



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR: HK.00.03-579 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR: 188.45-06 TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan daerah dan untuk menyesuaikan terhadap dinamika peraturan perundang-undangan, maka perlu merubah Keputusan Bupati Nomor: 188.45-06 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Belitung Timur Tahun 2024;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR: 188.45-06 TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TAHUN 2024.
- KESATU** : Mengubah untuk Kedua Kalinya Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-06 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Belitung Timur Tahun 2024.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terletak pada daftar Usulan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 16-08-2024  
BUPATI BELITUNG TIMUR,  
  
BURHANUDIN

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

No.	Judul>Nama Rancangan	Materi Yang Diatur	Dasar Hukum	Penanggung Jawab	Jadwal Pengajuan
1.	Pedoman Pembimbingan dan Pendampingan Pegawai Negeri Sipil Bertalenta	Pembimbingan dan Pendampingan Pegawai Negeri Sipil Bertalenta	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Triwulan 1
2.	Pedoman Tata Cara Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	Cuti Aparatur Sipil Negara	Peraturan BKN No 7 Tahun 2021, Peraturan BKN No 7 Tahun 2022	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Triwulan 1
3.	Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	1. Penegakan Disiplin bagi PNS; 2. Penegakan Disiplin bagi PPPK; 3. Pemberlakuan Hukuman Disiplin bagi ASN; dan 4. Upaya Administratif.	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Triwulan 1
4.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur 29 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan	Perubahan Ketentuan terkait kewajiban pegawai yang telah selesai tugas belajar dan dikenakan hukuman disiplin	PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Triwulan I

No.	Judul>Nama Rancangan	Materi Yang Diatur	Dasar Hukum	Penanggung Jawab	Jadwal Pengajuan
5.	Pencatatan Kehadiran Pegawai Secara Elektronik	Tata Cara Pencatatan dan Pengelolaan Data Kehadiran Pegawai	PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Triwulan 1
6.	Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka dan Kompetitif	Pengisian JPT Pratama	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Triwulan 1
7.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Sistem dan prosedur pemberian dan pemanfaatan bagi hasil pemungutan pajak dan retribusi daerah ke desa	UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Triwulan 1
8.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Sistem dan Prosedur Pengisian, Penilaian, Pembayaran dan monitoring Pajak BPHTB serta pelaporan PPAT dan Kantor Lelang	UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Triwulan 1
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Sistem dan prosedur pendaftaran, penilaian, pelaporan, pembayaran, penagihan, serta Monev PBB P-2	UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Triwulan 1
10.	Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan Stunting Periode Tahun 2024-2026	Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan Stunting Periode Tahun 2024-2026	Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan	Triwulan 1

No.	Judul>Nama Rancangan	Materi Yang Diatur	Dasar Hukum	Penanggung Jawab	Jadwal Pengajuan
			Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024	Pengembangan Daerah	
11.	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Periode Tahun 2024-2026	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Periode Tahun 2024-2026	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Triwulan 1
12.	Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berbasis Kinerja	Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berbasis Kinerja	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Triwulan 1
13.	Tata Cara Pemberian Insentif Fardu Kifayah, Marbot Masjid, Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an, Guru Madrasah Diniyah, dan Guru Mengaji	Tata Cara Pemberian Insentif Fardu Kifayah, Marbot Masjid, Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an, Guru Madrasah Diniyah, dan Guru Mengaji di Kabupaten Belitung Timur	UU 23 Tahun 2014 PP 12 Tahun 2019	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Triwulan 1
14.	Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah	penghilangan pasal terkait subkoordinator	Perda 1 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Bagian Organisasi	Triwulan 1
15.	Perubahan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi	penghilangan pasal terkait subkoordinator	Perda 1 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang	Bagian Organisasi	Triwulan 1

No.	Judul>Nama Rancangan	Materi Yang Diatur	Dasar Hukum	Penanggung Jawab	Jadwal Pengajuan
	Tugas Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah		Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur		
16.	Perubahan Bupati Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD	penghilangan pasal terkait subkoordinator	Perda 1 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Bagian Organisasi	Triwulan 1
17.	Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan	Kelas Jabatan sesuai surat Menpan Nomor: B/22/M.SM.02.00/2024 tanggal 8 Januari 2024 hal Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Instansi Daerah	Permenpan 34 tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan	Bagian Organisasi	Triwulan 1
18.	Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	perubahan nomenklatur dinas yang menaungi UPT	Perda 1 tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah kabupaten belitung timur Nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten belitung timur	Bagian Organisasi	Triwulan 1
19.	Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	perubahan nomenklatur dinas yang menaungi UPT	Perda 1 tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah kabupaten belitung timur Nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten belitung timur	Bagian Organisasi	Triwulan 1
20.	Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana	perubahan nomenklatur dinas yang menaungi UPT	Perda 1 tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah kabupaten belitung	Bagian Organisasi	Triwulan 1

No.	Judul>Nama Rancangan	Materi Yang Diatur	Dasar Hukum	Penanggung Jawab	Jadwal Pengajuan
	Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		timur Nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten belitung timur		
21.	Standar Kompetensi Jabatan Pengawas	Standar Kompetensi Jabatan Pengawas	PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS	Bagian Organisasi	Triwulan 1
22.	Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja UPT Balai Perikanan Budidaya	menghapus ayat 6 dan 7 terkait sub unit	Perda Nomor 1 tahun 2023 tentang perubahan ketiga perda 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten belitung timur	Bagian Organisasi	Triwulan 1
23.	Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja UPT Pengolahan Hasil Perikanan	menghapus ayat 6 dan 7 terkait sub unit	Perda Nomor 1 tahun 2023 tentang perubahan ketiga perda 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten belitung timur	Bagian Organisasi	Triwulan 1
24.	Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN	Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN	Permenpan Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri	Bagian Organisasi	Triwulan 1
25.	Tata Naskah Dinas	Tata Naskah Dinas	Permendagri 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah	Bagian Organisasi	Triwulan 1
26.	Kerjasama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pelangi Timur	Kerjasama Perumda Air Minum	Perda Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Triwulan 1
27.	Mekanisme Seleksi dan Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum	1. Pengangkatan Dewan Pengawas 2. Seleksi Dewan	Perda Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum	Bagian Perekonomian,	Triwulan 1

No.	Judul>Nama Rancangan	Materi Yang Diatur	Dasar Hukum	Penanggung Jawab	Jadwal Pengajuan
	Daerah Air Minum Pelangi Timur	Pengawas 3. Pengangkatan Direksi 4. Seleksi Direksi		Pembangunan dan Sumber Daya Alam	
28.	Penghasilan Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pelangi Timur	1. Penghasilan Dewan Pengawas 2. Penghasilan Direksi 3. Penghasilan Pegawai	Perda Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Triwulan 1
29.	Perubahan Road Map Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025-2027	Road Map Pengendalian Inflasi Daerah	Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2022 tentang Road Map Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022-2024	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Triwulan 1
30.	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdram) Pelangi Timur Kabupaten Belitung Timur	Susunan Organisasi dan Tata Kerja PERUMDAM Pelangi Timur	Perda Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Triwulan 1
31.	Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Timur No.64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	Perubahan tentang Kerjasama	PP 28 Tahun 2018 dan Permendagri No. 22 Tahun 2020	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	Triwulan 1
32.	Tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah	Pengelolaan Asrama Mahasiswa Yogyakarta dan Bandung	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	Bagian Umum	Triwulan 1
33.	Kebijakan Akuntansi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat	Kebijakan Akuntansi BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Belitung Timur	- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018	Dinas Kesehatan	Triwulan 1

No.	Judul>Nama Rancangan	Materi Yang Diatur	Dasar Hukum	Penanggung Jawab	Jadwal Pengajuan
34.	Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat	1. Sumber Daya manusia dan Remunerasi, 2. pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya, 3. pembinaan dan Pengawasan 4. Perencanaan dan penganggaran Badan Layanan Umum Daerah 5. pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum Daerah; 6. pengelolaan Barang Milik Daerah 7. Piutang dan Utang/Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah 8. Kerja sama Badan Layanan Umum Daerah 9. pengelolaan Investasi, sisa lebih perhitungan anggaran dan defisit anggaran 10. penatausahaan Keuangan	- Permendagri 79 Tahun 2018 - Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Dinas Kesehatan	Triwulan 1
35.	Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah pada Bidang Kesehatan	Pengadaan barang/jasa pada BLUD Bidang Kesehatan	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021	Dinas Kesehatan	Triwulan 1

No.	Judul>Nama Rancangan	Materi Yang Diatur	Dasar Hukum	Penanggung Jawab	Jadwal Pengajuan
36.	Tarif Pelayanan Kesehatan pada Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan	1. jenis Pelayanan Kesehatan 2. komponen Tarif 3. perhitungan Tarif 4. besaran Tarif 5. pembebasan Tarif 6. Pelaksanaan Tarif 7. Pengelolaan Penerimaan Tarif	- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 - Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2022 - Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022	Dinas Kesehatan	Triwulan 1
37.	Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pedoman Pengembangan Aplikasi	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Triwulan 1
38.	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Penyelenggaraan SPBE	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Triwulan 1
39.	Sistem Manajemen Keamanan Informasi	Sistem manajemen Keamanan Informasi	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Triwulan 1
40.	Smart City	Smart City	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Triwulan 1
41.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Daerah	Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Daerah	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Triwulan 1

No.	Judul>Nama Rancangan	Materi Yang Diatur	Dasar Hukum	Penanggung Jawab	Jadwal Pengajuan
42.	Jaringan Informasi Geospasial Daerah	Jaringan Informasi Geospasial Daerah	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Triwulan 1
43.	Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya	Tata Cara Pengelolaan Bantuan Sosial Kepada Individu Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	1. Undang-undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Pemerintah 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Triwulan 1
44.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Desa	Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Pemerintahan Desa	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Triwulan 1
45.	Penataan Dusun	Pedoman pembentukan, penghapusan dan penggabungan Dusun	Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian	Triwulan 1

No.	Judul>Nama Rancangan	Materi Yang Diatur	Dasar Hukum	Penanggung Jawab	Jadwal Pengajuan
				Penduduk dan Keluarga Berencana	
46.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur	a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko b) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah c) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu e) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur f) Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Triwulan 1
47.	Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kabupaten Belitung Timur Nomor 63 Tahun 2014 tentang Izin Reklame	Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2014 tentang Izin Reklame	a) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame b) Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2014 tentang Izin Reklame	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Triwulan 1

No.	Judul>Nama Rancangan	Materi Yang Diatur	Dasar Hukum	Penanggung Jawab	Jadwal Pengajuan
48.	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Selain Perizinan Berusaha	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Selain Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur	a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko b) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah c) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu e) Peraturan Bupati Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Triwulan 1
49.	Implementasi Kurikulum Merdeka Melalui Komunitas Belajar	a. pengalokasian anggaran Daerah pada proses penataan, pemerataan, pengembangan dan pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka melalui Komunitas Belajar; b. penguatan jejaring (kolaborasi) pemangku kepentingan pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka melalui	Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan	Dinas Pendidikan	Triwulan 1

No.	Judul>Nama Rancangan	Materi Yang Diatur	Dasar Hukum	Penanggung Jawab	Jadwal Pengajuan
		Komunitas Belajar; dan/atau c. perluasan dan penguatan program Implementasi Kurikulum Merdeka melalui Komunitas Belajar			
50.	Pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan	<p>BAB I Ketentuan Umum a. Pengertian b. Maksud dan Tujuan c. Prinsip d. Sasaran e. Cakupan</p> <p>BAB II Bentuk Kekerasan</p> <p>BAB III Pencegahan dan Penanganan Kekerasan a. Penguatan Tata Kelola b. Edukasi c. Penyediaan Sarana dan Prasarana</p> <p>BAB IV Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan a. Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan b. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan c. Sanksi bagi Kepala Satuan Pendidikan, TPPK dan Satuan Tugas</p> <p>BAB V Tata Cara Penanganan Kekerasan a. Umum b. Penerimaan Laporan c. Pemeriksaan d. Penyusunan, Kesimpulan dan Rekomendasi e. Tindak Lanjut Laporan Hasil</p>	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan	Triwulan 1

No.	Judul>Nama Rancangan	Materi Yang Diatur	Dasar Hukum	Penanggung Jawab	Jadwal Pengajuan
		<p>Pemeriksaan f. Pemulihan BAB VI Hak Korban, Pelapor, Saksi, dan Peserta Didik Sebagai Terlapor Dalam Penanganan Kekerasan BAB VII Partisipasi Masyarakat BAB VIII Pengelolaan Data Kasus Kekerasan BAB IX Penghargaan BAB X Petunjuk Teknis BAB XI Pendanaan BAB XII Ketentuan Penutup</p>			
51.	<p>Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Masyarakat</p>	<p>Penyelenggaraan program merdeka belajar pada Satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, serta Satuan Pendidikan Masyarakat meliputi Implementasi Kurikulum Merdeka Mandiri, pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, penerapan Perencanaan Berbasis Data, dan tata kelola Satuan Pendidikan.</p>	<p>a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah b. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah</p>	Dinas Pendidikan	Triwulan 1

No.	Judul>Nama Rancangan	Materi Yang Diatur	Dasar Hukum	Penanggung Jawab	Jadwal Pengajuan
52.	Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	a.Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif; b.Pembentukan, tugas, dan Fungsi Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan c.Sumber Daya Manusia, layanan, sarana dan prasarana pada unit layanan disabilitas Pendidikan d.Pembiayaan	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	Dinas Pendidikan	Triwulan 1
53.	Pendaftaran, Pelaporan, Pemberian Penghargaan dan Alih Media Naskah Kuno	Pendaftaran, Pelaporan, Pemberian Penghargaan Bagi Masyarakat dan Alih Media Naskah Kuno	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Triwulan 1
54.	Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Kabupaten Belitung Timur	Tata Cara Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Kabupaten Belitung Timur	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Triwulan 1
55.	Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Kabupaten Belitung Timur	Pelaksanaan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Kabupaten Belitung Timur	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Triwulan 1
56.	Pedoman Umum Pengembangan Ternak Sapi	Pengembangan ternak sapi sebagai langkah pemenuhan komoditas pangan dan upaya optimalisasi sumber daya dan pemberdayaan masyarakat ternak sapi	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan	Dinas Pertanian dan Pangan	Triwulan 1

No.	Judul>Nama Rancangan	Materi Yang Diatur	Dasar Hukum	Penanggung Jawab	Jadwal Pengajuan
57.	Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Swadaya Perkebunan Sawit dan Pekerja di Ekosistem Perkebunan Sawit di Kabupaten Belitung Timur	Program dan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua	Dinas Pertanian dan Pangan	Triwulan 1
58.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah	Dinas Pertanian dan Pangan	Triwulan 1
59.	Pedoman Pendataan dan Kriteria Kemiskinan Ekstrem	Kriteria Kemiskinan Ekstrem Daerah , mekanisme Pendataan dan Pemutakhiran data, Penetapan data hasil penataan dan verifikasi vaktual	Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Percepatan Penghapuan Kemiskinan Ekstrem, Keputusan Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapuan Kemiskinan Ekstrem Serta Keputusan Menteri RI Nomor 262/HUK/2022 tentang Kriteria Fakir Miskin	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Triwulan 1
60.	Pedoman Audit Ketaatan	- Pendahuluan - Perencanaan Audit Ketaatan - Pelaksanaan Audit Ketaatan - Pelaporan	Peraturan Deputi Kepala Bidang Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 07 Tahun 2020 tentang	Inspektorat	Triwulan 1

No.	Judul>Nama Rancangan	Materi Yang Diatur	Dasar Hukum	Penanggung Jawab	Jadwal Pengajuan
		Audit Ketaatan - Tindak Lanjut Hasil Audit Ketaatan - Penutup	Pedoman Umum Audit Ketaatan Dilingkungan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah		
61.	Pedoman Audit Kinerja	- Pendahuluan - Gambaran Umum Audit Kinerja - Perencanaan Audit Kinerja - Pelaksanaan Audit Kinerja - Komunikasi Hasil Audit Kinerja - Penutup - Format Dokumen Audit Kinerja	Peraturan Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Pemerintah Daerah No PED-09/D3/04/2020 tentang Pedoman Umum Audit Kinerja Berbasis Risiko	Inspektorat	Triwulan 1
62.	Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	- Pendahuluan - Perancangan Desain Evaluasi AKIP - Mekanisme Evaluasi AKIP - Pelaksanaan Evaluasi AKIP - Pelaporan dan Pengkomunikasian Hasil Evaluasi AKIP - Penutup	- Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Inspektorat	Triwulan 1
63.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Khusus Pengawasan Dalam Daerah di Lingkungan Inspektorat Daerah	ruang lingkup perjalanan dinas, perjalanan dinas khusus pengawasan, biaya perjalanan dinas, pertanggung jawaban pembayaran biaya perjalanan dinas,	1. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja inspektorat daerah 2. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 3 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan bupati Belitung timur Nomor 16 Tahun 2014 tentang pedoman operasional pemeriksaan di lingkungan inspektorat kabupaten Belitung timur	Inspektorat	Triwulan 1

No.	Judul>Nama Rancangan	Materi Yang Diatur	Dasar Hukum	Penanggung Jawab	Jadwal Pengajuan
64.	Pola Tata Kelola Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur	Organisasi dan tata laksana, Manajemen pengelolaan BLUD, Pengelolaan keuangan, Pengelolaan BMD, Pengelolaan Kepegawaian, Komite, Dewan Pengawas, Satuan Pemeriksa Internal, dan Tenaga Fungsional lain.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	Rumah Sakit Umum Daerah	Triwulan 2
65.	Analisis Standar Belanja	Penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam tahapan perencanaan dan penganggaran suatu kegiatan	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Triwulan 2
66.	Pajak Barang dan Jasa Tertentu	Sistem dan Prosedur Pendataan, Pendaftaran, Pembayaran dan monev Pajak Barang dan Jasa Tertentu	UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Triwulan 2
67.	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah - Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah"	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Triwulan 2
68.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024	Perubahan Lampiran	Perpres No 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Triwulan 2

No.	Judul>Nama Rancangan	Materi Yang Diatur	Dasar Hukum	Penanggung Jawab	Jadwal Pengajuan
69.	Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Pergeseran APBD TA. 2024	- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah - Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah"	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Triwulan 2
70.	Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah	Pedoman teknis yang mengatur tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Belanja Daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Triwulan 2
71.	Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025	Standar harga satuan untuk SSH dan SBU	Perpres No 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Triwulan 2
72.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025	RKPD Tahun 2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Triwulan 2
73.	Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional	Standar Kompetensi Jabatan Fungsional	Permenpan 38 Tahun 2017	Bagian Organisasi	Triwulan 2
74.	Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	Hasil Validasi Evaluasi Jabatan dari Menpan	Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	Bagian Organisasi	Triwulan 2
75.	Tata Cara Pengelolaan Mess Pemerintah Daerah	Tata Cara Pengelolaan Mess	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	Bagian Umum	Triwulan 2

No.	Judul>Nama Rancangan	Materi Yang Diatur	Dasar Hukum	Penanggung Jawab	Jadwal Pengajuan
76.	Rumah Singgah Pasien	Pengelolaan Rumah Singgah Pasien	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	Bagian Umum	Triwulan 2
77.	Kebijakan Penerapan Program Yuk Gi Nyelik Pasien	Petunjuk Teknis Pelayanan Yuk Gi Nyelik Pasien Kabupaten Belitung Timur	- UU No. 36 / 2009 tentang Kesehatan - UU No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan - UU No.38/2014 tentang Keperawatan - Perpres No. 72/2012 tentang SKN - Permenkes No 39/2016 tentang PIS-PK - Kepmenkes 279/2006 tentang Perkesmas	Dinas Kesehatan	Triwulan 2
78.	Tata Cara Penilaian dan Model Intervensi Perumahan Rakyat di Kabupaten Belitung Timur	Tata Cara Penilaian dan Model Intervensi Perumahan Rakyat	1. Undang-undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Pemerintah 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Triwulan 2
79.	Zonasi Kawasan untuk Pemasangan Reklame	Zonasi Kawasan untuk Pemasangan Reklame	1. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame 2. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Triwulan 2

No.	Judul>Nama Rancangan	Materi Yang Diatur	Dasar Hukum	Penanggung Jawab	Jadwal Pengajuan
80.	Zonasi Kawasan Untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	Zonasi Kawasan Untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan 2. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Triwulan 2
81.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	Pedoman Penataan LKD dan LAD	Permendagri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Triwulan 2
82.	Raperbup tentang BPD	Pedoman Penjaringan, Peresmian dan Pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa	Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Triwulan 2
83.	Raperbup tentang Pedoman, Pengurusan, dan Pengelolaan BUMDES	Pedoman, Pengurusan, dan Pengelolaan BUMDES	Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Triwulan 2

No.	Judul>Nama Rancangan	Materi Yang Diatur	Dasar Hukum	Penanggung Jawab	Jadwal Pengajuan
84.	Raperbup tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Desa	Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Desa	Permendagri Nomor Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Triwulan 2
85.	Program Teknologi Inovasi Pembudidaya Milenial dan Budidaya untuk Ketahanan Pangan	Program yang diadakan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya regenerasi kaum milenial sebagai Pembudidaya Ikan dan Program yang diadakan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perikanan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Dinas Perikanan	Triwulan 2
86.	Jadwal Retensi Arsip Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Agama, Urusan Agraria dan Tata Ruang, Urusan Penanggulangan Bencana, Urusan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan, Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Urusan Pencairan dan Pertolongan, Urusan	Jadwal Retensi Arsip urusan agama dan urusan pengadaan urusan penelitian, pengkajian dan pengembangan urusan kepemudaan dan olahraga urusan bencana dan urusan pencarian pertolongan urusan persandian dan urusan statistik PU yaitu urusan agraria dan	Perda Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Perka Nomor 14 tahun 2015 ttg Penyusunan JRA	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Triwulan 2

No.	Judul>Nama Rancangan	Materi Yang Diatur	Dasar Hukum	Penanggung Jawab	Jadwal Pengajuan
	Pengadaan, Urusan Persandian dan Statistik	tata ruang, dan urusan energi dan sumber daya mineral			
87.	Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis	Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis urusan Agama, Pengadaan Barang dan Jasa, Agraria dan Tata Ruang, ESDM, Penanggulangan Bencana, Pencarian dan Pertolongan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Daerah, Pemuda dan Olahraga, Persandian dan Statistik	Perda Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Triwulan 2
88.	Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023-2026	Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Belitung Timur	Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024	Dinas Pertanian dan Pangan	Triwulan 2
89.	Audit Investigasi	Gambaran Umum Investigasi; Perencanaan Investigasi; Pelaksanaan Investigasi ; Kerjasama Investigasi; Penginformasian dan Pengkomunikasian Investigasi; Pelaporan Hasil Investigasi; Format Dokumen Investigasi: Perencanaan Pelaksanaan Pelaporan Audit Investigasi;	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	Inspektorat	Triwulan 2

No.	Judul>Nama Rancangan	Materi Yang Diatur	Dasar Hukum	Penanggung Jawab	Jadwal Pengajuan
		Perencanaan Pelaksanaan Pelaporan Audit/Pengawasan Tujuan Tertentu Bidang Investigasi;			
90.	Kendali Mutu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendahuluan - Pedoman Penyusunan Rencana Srtategis</li> <li>- Pedoman Pengendalian Mutu Perencanaan Audit APIP</li> <li>- Pedoman Pengendalian Mutu Penyusunan Rencana dan Program Kerja Audit</li> <li>- Pedoman Pengendalian Mutu Supervisi Audit</li> <li>- Pedoman Pengendalian Mutu Pelaksanaan Audit</li> <li>- Prosedur Pengendalian Mutu Pelaporan Audit</li> <li>- Pedoman Pengendalian Mutu Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit</li> <li>- Pedomana Pengendalian Mutu Tata Usaha dan Sumber Daya Manusia</li> </ul>	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Inspektorat	Triwulan 2
91.	Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketentuan Umum - Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup</li> <li>- Pengawasan Oleh Aparat Pengawas Internal</li> <li>- Pengawasan Oleh Camat</li> <li>- Pengawasan Oleh Badan Permusyawaratan Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa</li> </ul>	Inspektorat	Triwulan 2

No.	Judul>Nama Rancangan	Materi Yang Diatur	Dasar Hukum	Penanggung Jawab	Jadwal Pengajuan
		Pengawasan Oleh Masyarakat Desa - Sistem Informasi Pengawasan - Ketentuan Penutup			
92.	Pemberian Keterangan Ahli	Gambaran Umum PKA; Perencanaan PKA; Pelaksanaan PKA ; Kerjasama PKA; Penginformasian dan Pengkomunikasian PKA; Pelaporan Hasil PKA; Format Dokumen PKA:	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	Inspektorat	Triwulan 2
93.	Pengaduan Masyarakat	Gambaran Umum Pengaduan Masyarakat; Perencanaan Penanganan DuMas; Pelaksanaan Penanganan DuMas; Kerjasama Penanganan DuMas; Penginformasian dan Pengkomunikasian Penanganan DuMas; Pelaporan Hasil Penanganan Dumas; Penanganan DuMas On Line; Penanganan DuMas Off Line; Format Formulir Penanganan DuMas	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	Inspektorat	Triwulan 2

No.	Judul>Nama Rancangan	Materi Yang Diatur	Dasar Hukum	Penanggung Jawab	Jadwal Pengajuan
94.	Perhitungan Kerugian Keuangan Negara	Gambaran Umum PKKN; Perencanaan PKKN; Pelaksanaan PKKN ; Kerjasama PKKN; Penginformasian dan Pengkomunikasian PKKN; Pelaporan Hasil PKKN; Format Dokumen PKKN:	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	Inspektorat	Triwulan 2
95.	Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Inspektorat	Triwulan 2
96.	Whistleblowing System	Gambaran Umum Wistle Blowing System WBS; Perencanaan Penanganan WBS; Pelaksanaan Penanganan WBS; Kerjasama Penanganan WBS; Penginformasian dan Pengkomunikasian Penanganan WBS; Pelaporan	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Inspektorat	Triwulan 2

No.	Judul>Nama Rancangan	Materi Yang Diatur	Dasar Hukum	Penanggung Jawab	Jadwal Pengajuan
		Hasil Penanganan WBS; Penanganan WBS On Line; Penanganan WBS Off Line; Format Formulir Penanganan WBS	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi		
97.	Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	UU 23 Tahun 2014 beserta perubahannya PP 1 Tahun 2023	Sekretariat DPRD	Triwulan 2
98.	Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Pedoman Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Triwulan 3

No.	Judul>Nama Rancangan	Materi Yang Diatur	Dasar Hukum	Penanggung Jawab	Jadwal Pengajuan
99.	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024	Perubahan RKPD 2024	Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Triwulan 3
100.	Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas	Pakaian Dinas	UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya	Bagian Organisasi	Triwulan 3
101.	Perubahan Bupati Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah	perubahan pada BKPSDM dan Bappelitbangda	Perda 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Bagian Organisasi	Triwulan 3
102.	Perubahan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 41 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja UPT Laboratorium Lingkungan	perubahan kelas UPT	Perda 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Bagian Organisasi	Triwulan 3
103.	Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kabupaten Belitung Timur	Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kabupaten Belitung Timur	1. Undang-undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Pemerintah 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Triwulan 3

No.	Judul>Nama Rancangan	Materi Yang Diatur	Dasar Hukum	Penanggung Jawab	Jadwal Pengajuan
			tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
104.	Tatacara Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas	Tatacara Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas	1. Permendagri 08 tahun 2008 2. Perda Kabupaten Belitung Timur 01 tahun 2023	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Triwulan 3
105.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 65 Tahun 2023 Tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024	Pengaturan besaran, tatacara dan syarat Alokasi dana desa	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Triwulan 3
106.	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2024	Tata cara penyusunan APBBDes perubahan	Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Triwulan 3
107.	Raperbup ADD Tahun Anggaran 2025	Pengaturan besaran, tatacara dan syarat Alokasi dana desa	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Triwulan 3

No.	Judul>Nama Rancangan	Materi Yang Diatur	Dasar Hukum	Penanggung Jawab	Jadwal Pengajuan
108.	Raperbup Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025	Tata cara penyusunan APBBDes	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Triwulan 3
109.	Raperbup tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permasyarakatan Desa	Pedoman pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permasyarakatan Desa	Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Triwulan 3
110.	Pelaksanaan Transaksi Non-Tunai di Desa	Pedoman transaksi keuangan non tunai pada pengelolaan keuangan dan belanja desa	Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Triwulan 3
111.	Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi	Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah	UU No. 27 Tahun 2000, UU No. 5 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2007, UU No. 20 Tahun 2008, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014,	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Triwulan 3
112.	Fraud Control Plan	Gambaran Umum FCP; Perencanaan FCP (Deteksi/Identifikasi, Mitigasi, Pengendalian, Tindak Lanjut); Pelaksanaan FCP	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Inspektorat	Triwulan 3

No.	Judul>Nama Rancangan	Materi Yang Diatur	Dasar Hukum	Penanggung Jawab	Jadwal Pengajuan
		(Deteksi/Identifikasi, Mitigasi, Pengendalian, Tindak Lanjut) ; Kerjasama FCP (Deteksi/Identifikasi, Mitigasi, Pengendalian, Tindak Lanjut); Penginformasian dan Pengkomunikasian FCP (Deteksi/Identifikasi, Mitigasi, Pengendalian, Tindak Lanjut); Pelaporan Hasil FCP (Deteksi/Identifikasi, Mitigasi, Pengendalian, Tindak Lanjut); Format Dokumen FCP (Deteksi/Identifikasi, Mitigasi, Pengendalian, Tindak Lanjut)	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi		
113.	Hari Jadi Kecamatan Kelapa Kampit	Hari Jadi Kecamatan Kelapa Kampit	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Kecamatan Kelapa Kampit	Triwulan 3
114.	Mal Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Daerah	Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Permenpan RB Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Triwulan 3

No.	Judul>Nama Rancangan	Materi Yang Diatur	Dasar Hukum	Penanggung Jawab	Jadwal Pengajuan
115.	Sumber Daya Manusia dan Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan	a.Sumber Daya Manusia b.Remunerasi c.Monitoring dan Evaluasi	Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018	Dinas Kesehatan	Triwulan 3
116.	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	APBD Tahun Anggaran 2025	- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah - Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah"	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Triwulan 4
117.	Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024	- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah - Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Triwulan 4
118.	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kelapa Kampit	Rencana Rinci Tata Ruang	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Perubahan, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang 3. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Triwulan 4

No.	Judul>Nama Rancangan	Materi Yang Diatur	Dasar Hukum	Penanggung Jawab	Jadwal Pengajuan
	Andalan Mandiri Pusat Inovasi Terpadu Tahun 2025-2029	Andalan Mandiri Pusat Inovasi Terpadu Tahun 2025-2029	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Penelitian dan Pengembangan Daerah	

